DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulissa Banemay. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman,Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha.* Jakarta: Kencana.

Budi H, Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia.* Yogyakarta.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.

Hartini, Rahayu 2007. *Hukum Kepailitan.* Malang : UMM Press.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan .

Koermen. 2003. *Manajemen Koperasi Terapan.* Jakarta : Prestasi Pusaka Raya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.

Munkner, Hans-H. 2004. *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi*. Bandung : Alumnni.

Rahardja, Sutantya. *Hukum Koperasi Di Indonesia.* Jakarta.

Revrisond, Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia.* Yogyakarta : BPFE.

Sitio, Arifin., dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :PT. Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro,Ronny Hanitijo. 1988.*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi;

Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi;

Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pegusaha Kecil Republik Indonesia No. 269/M/IX/1994.